

SINOPSIS

Kinerja organisasi mengisyaratkan bahwa penilaian kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. Sejalan dengan sistem pemerintahan saat ini, Protokol pemerintahan dituntut untuk merubah paradigma dalam setiap penyelenggaraan sistem maupun kegiatan pemerintahan. Protokol berperan penting dalam penyelenggaraan *good governance*, demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Berhasil ataupun tidaknya kegiatan yang dilaksanakan, pada akhirnya akan mengacu pada sasaran utamanya tadi. Seringkali baik bagi instansi maupun perusahaan mengabaikan evaluasi pada setiap kegiatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai Bagian Protokol Kabupaten Bantul. Hasil penelitian dilakukan melalui 6 aspek yaitu pelaksanaan tugas keprotokolan, pencapaian tugas keprotokolan, produktifitas, kualitas layanan, responsibilitas, akuntabilitas.

Secara keseluruhan dari semua aspek tersebut kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul sudah baik dan sesuai target meskipun pada proses pelaksanaan disetiap kegiatan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki lagi. Tetapi berdasarkan aspek-aspek tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar adalah pelaksanaan dan pencapaian tugas keprotokolan, dari aspek tersebut dapat diketahui hasil dari kinerja Bagian Protokol itu sendiri. Untuk aspek produktivitas dan akuntabilitas diketahui bahwa hasilnya sudah baik. Yang perlu ditingkatkan yaitu aspek kualitas pelayanan dan aspek responsibilitas. Kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul diantaranya kurangnya personil atau pegawai, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Berdasarkan faktor-faktor tersebut faktor yang paling berpengaruh cukup besar dalam peningkatan kinerja yaitu faktor personil atau pegawai.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pada Bagian Protokol Kabupaten Bantul secara umum dapat dikatakan sudah baik sesuai dengan target dan secara keseluruhan dapat disimpulkan berada pada level "baik". Namun terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek yang perlu dibenahi. Saran dari penulis agar Bagian Protokol Bantul meningkatkan kualitas dan kreatifitas pegawai sehingga Bagian Protokol Kabupaten Bantul bisa lebih baik dalam mengurus kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten dan perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Bantul agar memenuhi kebutuhan Bagian Protokol Bantul untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Protokol.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja, Protokol

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kinerja organisasi mengisyaratkan bahwa penilaian kinerja sesungguhnya sangat penting untuk melihat sampai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditempuh usaha-usaha melalui perbaikan kinerja organisasi dan kinerja pegawai aparatur, baik melalui kepemimpinan dari atasan langsung maupun pelaksanaan dari para staf yang ada didalam bagian itu sendiri, agar segala dampak negatif dari kegiatan pengelolaan pemerintahan dapat dihindarkan serta dampak positifnya dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan sistem pemerintahan saat ini, Protokol pemerintahan dituntut untuk merubah paradigma dalam setiap penyelenggaraan sistem maupun kegiatan pemerintahan. Protokol berperan penting dalam penyelenggaraan *good governance*.

Berdasarkan peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Bagian Protokol mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas keprotokolan, pelayanan dan pemberian dukungan pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.

Penelitian mengenai evaluasi kinerja oleh Bagian Protokol Kabupaten Bantul menjadi sangat menarik, karena masih sangat sedikit jumlah penelitian mengenai evaluasi

kinerja khususnya Bagian Protokol Kabupaten Bantul. Evaluasi dapat menentukan bagaimana hasil kerja yang sesuai atau tidaknya dengan sasaran yang diharapkan dan seberapa jauh efisiensi dari tim yang mengerjakan kegiatan tersebut.

Berhasil ataupun tidaknya kegiatan yang dilaksanakan, pada akhirnya akan mengacu pada sasaran utamanya tadi. Seringkali baik bagi instansi maupun perusahaan mengabaikan evaluasi pada setiap kegiatan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk mengevaluasi bagaimana kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul. Penelitian ini akan berdasar pada kompetensi dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat dalam menjalankan tugas sebagai bagian protokol secara praktis pemerintah Kabupaten Bantul masih terdapat ketimpangan kinerja, hal tersebut disebabkan minimnya sumber daya manusia, sehingga terjadi tumpang tindih antara satu pegawai dengan beberapa tugas sekaligus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian evaluative deskriptif. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dijabarkan rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Kinerja Bagian Protokol Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul apakah sudah sesuai dengan indikator kompetensi Protokol Kabupaten Bantul.

D. KERANGKA TEORI

Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, menurut Agus Dwiyanto (2008) yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah pengukuran dan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi atau lembaga, dengan menggunakan indikator dalam pengukurannya.

2. Organisasi

Organisasi adalah alat saling berhubungan dari satuan-satuan kerja yang memberikannya kepada orang yang ditempatkannya didalam struktur kekuasaan atau kewenangan sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh badan usaha.

3. Protokol

Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan terhadap seseorang dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Bagian Protokol Setda Kabupaten Bantul. merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat proses evaluasi kinerja yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal pada evaluasi kinerja Bagian protokol terkait.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan pegawai Bagian Protokol Kabupaten Bantul.

BAB II PEMBAHASAN

1. Produktifitas

Sebagai pelayan bagi masyarakat, tak jarang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul dan SKPD yang dimilikinya harus bisa bersinergi dalam mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik dan tentu ini semua yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Maka dalam rangka mencapai itu semua pemerintahan Kabupaten Bantul dengan masing-masing dinas yang dimilikinya mencoba memanfaatkan dan mengoptimalkan segala sumber kekuatan seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam dan yang itu semua bisa membangun kemajuan daerah tersebut.

Jika mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Protokol Kabupaten Bantul pada tahun 2015, maka indikator produktifitas dapat dilihat dari aspek berikut :

Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas Bagian Protokol Kabupaten Bantul yang dapat dilaksanakan. Secara umum Bagian Protokol telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sudah di tetapkan.

Mengingat dalam menjalankan tugas sebagai bagian protokol secara praktis pemerintah Kabupaten Bantul masih terdapat ketimpangan kinerja, hal tersebut disebabkan minimnya sumber daya manusia, sehingga terjadi tumpang tindih antara satu

pegawai dengan beberapa tugas sekaligus.

Dalam setiap kegiatan keprotokolannya, Bagian Protokol Kabupaten Bantul selalu berupaya dengan maksimal agar setiap acara yang diadakan Kabupaten dapat berjalan dengan lancar. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan koordinasi antara individu yang termasuk dalam Subbagian Protokol.

Secara keseluruhan, kegiatan keprotokolannya yang dilakukan, hampir sama di tiap kegiatan yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bantul, hanya menyesuaikan dengan tema dari acara yang akan dilaksanakan. Serangkaian aktifitas keprotokolannya tersebut nantinya akan berujung pada pencitraan positif Kabupaten.

Jadi Bagian Protokol harus dapat menertibkan, mengamankan, dan memberikan rasa nyaman pada setiap undangan atau tamu yang hadir dalam acara Kabupaten agar dapat memberikan kesan positif bagi Kabupaten.

Kemudian dalam jumlah kegiatan yang dilakukan semua sudah berjalan dengan baik. Biasanya kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pihak lain dan instansi terkait.

Dalam dimensi mutu hasil kerja sesuai standar maka ditemukan bahwa tidak adanya standar kerja yang ada yang khusus dibuat untuk menjalankan pekerjaan para pegawai, pentingnya standar kerja merupakan hal yang harus diperhatikan agar pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan.

Kemudian, efektivitas hasil kerja pegawai Bagian Protokol Kabupaten yang dapat dilihat dari kemampuan para pegawai terhadap pekerjaannya di Bagian Protokol Kabupaten sudah baik.

Jika melihat data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat produktifitas Bagian Protokol

Kabupaten Bantul sudah baik dan sesuai target meskipun pada proses pelaksanaan di setiap kegiatan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki lagi. Proses perbaikan dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan yang mendatang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal untuk kedepannya.

2. Kualitas Layanan

Pada indikator kualitas peningkatan berikut penulis maksudkan adalah menjelaskan informasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini Bagian Protokol Kabupaten Bantul, tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dari seberapa baik kualitas kinerja yang diberikan sehingga dapat mengoptimalkan.

Beberapa indikator penilaian tersebut sangat penting dalam aspek kualitas pelayanan karena dapat mengetahui seberapa jauh masyarakat mengenal pegawai Bagian Protokol Kabupaten Bantul :

a. Pelayanan

Adapun bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Bagian Protokol Kabupaten Bantul seperti mengorganisir pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan pejabat pemerintahan serta kunjungan-kunjungan pejabat. Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri telah membuat ketentuan penerimaan kunjungan kerja atau studi banding di Kabupaten Bantul guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu atau peserta kunjungan kerja atau studi banding dari mitra Kabupaten Bantul.

b. Ketrampilan Pegawai

Ketrampilan dari pegawai Bagian Protokol Kabupaten

Bantul akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu Bagian Protokol sebaiknya mengikuti pelatihan dan pengetahuan dalam bidang keprotokoleran, karena akan berdampak pada bertambahnya kemampuan dan keterampilan masing-masing pegawai.

Dalam hal kualitas pelayanan pihak Bagian Protokol Kabupaten Bantul mengadakan pelatihan untuk para pegawai, karena meskipun dari segi pendidikan belum memenuhi tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pegawai. Karena jika pegawai kurang paham terhadap tugas yang diberikan maka akan mengurangi kualitas pelayanan.

c. Responsibilitas

Pada indikator berikutnya yang penulis maksudkan dengan responsibilitas berupa capaian kinerja yang sudah dilakukan dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam Bagian Protokol Kabupaten Bantul pasti memiliki target kerja berupa visi dan misi yang telah dirancang bersama. Kemudian dalam periode masa kerja tahunan Bagian Protokol Kabupaten Bantul juga memiliki prioritas kerja yang dirancang bersama. Aspek responsibilitas dapat diukur berdasarkan indikator Hasil dan Program Kegiatan.

Pada aspek responsibilitas dapat diketahui bahwa Bagian Protokol Kabupaten Bantul sudah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Bagian Protokol Kabupaten Bantul. Aspek responsibilitas juga dapat dilihat dari semangat pegawai, di atas sudah dijelaskan bahwa meskipun

dalam segi pendidikan pegawai masih banyak kekurangan tetapi mereka mampu menutupinya dengan pegawai mengikuti pelatihan. Untuk pengembangan sarana dan prasarana Bagian Protokol Kabupaten Bantul juga ikut berperan meskipun sebagai fasilitator.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat. Kinerja organisasi tidak hanya bisa melihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi atau pemerintah seperti pencapaian target.

Acuan Pelayanan dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Hal tersebut mencerminkan prinsip pelayanan publik yang dikembangkan bertujuan untuk masyarakat pengguna jasa. Prosedur pelayanan diharapkan sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat harus mendapatkan perhatian disetiap penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik.

Oleh karena itu Bagian Protokol Kabupaten Bantul diharapkan memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat hal

itu diharapkan agar Bagian Protokol Kabupaten Bantul mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat supaya nantinya Bagian Protokol sendiri dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Dalam hal pelayanan yang dibutuhkan masyarakat atau SKPD lain dari luar daerah adanya komunikasi yang terjalin antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten lain maupun SKPD lain dari luar daerah. Jika sudah ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak maka akan mempermudah proses pelaksanaan program dan kegiatan.

Bentuk Pertanggungjawaban, Dinas berkewajiban untuk membuat serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas kepada Pemerintah Daerah, begitupun dengan Bagian Protokol Kabupaten Bantul. Hal itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan kinerja Bagian Protokol setiap tahunnya melalui hasil program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Protokol. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun pada instansi pemerintah.

Bagian Protokol Kabupaten Bantul telah mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan dengan menyerahkan Laporan Akhir Institusi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal tersebut bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat mengetahui hasil

yang dicapai pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan serta agar Pemerintah Kabupaten Bantul mengetahui kinerja Bagian Protokol setiap tahunnya.

Pada aspek Akuntabilitas diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta prosedur pelayanan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di masyarakat demi kepuasan masyarakat. Komunikasi yang terjalin antara Bagian Protokol Kabupaten Bantul dan masyarakat atau SKPD lain dari luar maupun dalam daerah sudah cukup baik, tetapi meskipun begitu komunikasi harus selalu ditingkatkan kedepannya jauh lebih baik. Jika dilihat dari aspek akuntabilitas lainnya. Bagian Protokol Kabupaten Bantul mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatannya setiap tahun dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul.

Bahwa SDM sangat mempengaruhi hasil kinerja. Disamping itu keadaan tingkat pendidikan pegawai juga mempengaruhi kualitas kerja kinerja pelayananyang diberikan kepada masyarakat.

Dengan data diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Bagian Protokol Kabupaten Bantul adalah Sarjana. Meski dalam analisis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pemahaman pegawai dengan tugas dan tanggungjawabnya pemerintah melakukan pelatihan untuk pegawai Bagian Protokol Kabupaten Bantul tetapi faktor

pendidikan juga penting untuk melihat kualitas pelayanan.

Sarana dan prasarana mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan kerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang ada di dalam Bagian Protokol Kabupaten Bantul, dari data diatas dapat dilihat bahwa untuk sarana masih dikatakan belum cukup, mengingat bahwa ada tiga bagian yang ada di Bagian Protokol Kabupaten Bantul, yaitu meliputi Bagian Tata Laksana Acara, Bagian Administrasi Bupati dan Wakil Bupati, Bagian Administrasi Sekda dan Asisten. Tugas, kegiatan serta tanggung jawab yang harus di jalankan oleh Bagian Protokol Kabupaten Bantul juga cukup banyak, tetapi kalau dilihat dari data diatas masih dikatakan belum cukup untuk Bagian Protokol sangat berpengaruh untuk memberikan pelayanan yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang ada di dalam Bagian Protokol akan berpengaruh dengan pelayanan yang kurang maksimal yang diberikan untuk masyarakat.

Bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam Bagian Protokol masih terdapat kekurangan. Seperti contohnya masalah ruangan yang kurang kondusif, alat transportasi yang kadang-kadang kendaraan pribadi pegawai digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dinas.

Penyediannya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pegawai melaksanakan tugasnya. Fasilitas kerja yang

memadai merupakan sesuatu yang diperlukan. Pegawai dalam melaksanakan tugasnya harus didukung dengan fasilitas yang memadai, karena tidak mungkin tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul yang diukur dari beberapa aspek yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas dan akuntabilitas kemudian pelaksanaan tugas dan pencapaian tugas keprotokolan, secara keseluruhan dari semua aspek tersebut kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul sudah baik dan sesuai target meskipun pada proses pelaksanaan disetiap kegiatan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki lagi. Tetapi berdasarkan aspek-aspek tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar adalah pelaksanaan dan pencapaian tugas keprotokolan, dari aspek tersebut dapat diketahui hasil dari kinerja Bagian Protokol itu sendiri. Untuk aspek produktivitas dan akuntabilitas diketahui bahwa hasilnya sudah baik. Yang perlu ditingkatkan yaitu aspek kualitas pelayanan dan aspek responsibilitas.
2. Terdapat beberapa kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja Bagian Protokol

Kabupaten Bantul dalam tugas keprotokoleran diantaranya kurangnya personil atau pegawai, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Berdasarkan faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh cukup besar dalam peningkatan kinerja yaitu faktor personil. Sedangkan untuk faktor yang dinilai masih kurang yaitu faktor sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran karena bisa menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul sudah baik dan sesuai target meskipun pada proses pelaksanaan disetiap kegiatan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki lagi, tetapi untuk kedepannya masih perlu ditingkatkan lagi agar kinerja Bagian Protokol Kabupaten Bantul kedepannya lebih baik lagi.

B. SARAN

Untuk aspek kualitas pelayanan perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kreatifitas pegawai sehingga Bagian Protokol bisa lebih baik dalam mengurus kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten, mengatur pelaksanaan para pimpinan, membantu tugas pimpinan dan membangun citra kabupaten. Serta penambahan personil atau pegawai, seperti yang

diketahui bahwa di Bagian Protokol Kabupaten Bantul hanya terdapat 18 orang padahal mereka harus memberikan pelayanan dan membantu tugas pimpinan yang ada di Kabupaten Bantul.

Peningkatan untuk aspek akuntabilitas dengan meningkatkan komunikasi kepada pimpinan, SKPD lain agar komunikasi yang baik tetap terjalin serta tidak terjadi perbedaan perspektif antara Bagian Protokol Kabupaten Bantul dengan pimpinan atau SKPD lain.

Perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Bagian Protokol Kabupaten Bantul agar bisa memenuhi kebutuhan Bagian Protokol Kabupaten Bantul untuk bisa melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Protokol Kabupaten Bantul.